KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN MALANG 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

RPJMD 2016-2021

Perda 14/2018 ttg Perubahan atas Perda 6/2016 ttg RPJMD

VISI RPJMD

Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

MISI 2 RPJMD

Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi

TUJUAN 1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat

SASARAN 2

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

RENSTRA 2016-2021

Keputusan Bupati Nomor: 188.45/999/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang nomor: 188.45/599/KEP/ 35.07.013/2016 tentang Pengesahan Ranc. Akhir Renstra Inspektorat

TUJUAN

Peningkatan efektivitas pengawasan

SASARAN 1

Peningkatan akuntabilitas keuangan perangkat daerah

SASARAN 2

Peningkatan penyelesaian TLHP

SASARAN 3

Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus)

SASARAN 4

Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

INDIKATOR

INDIKATOR TUJUAN

Persentase PD yang mengelola keuangan secara efektif dan efisien (tidak ada temuan yang material)

INDIKATOR SASARAN 1

Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat

INDIKATOR SASARAN 2

1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawas eksternal

INDIKATOR SASARAN 3

Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan

INDIKATOR SASARAN 4

Persentase PD dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B

PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

PEMKAB

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN MALANG YANG ISTIQOMAH DAN MEMILIKI MENTAL BEKERJA KERAS GUNA MENCAPAI KEMAJUAN PEMBANGUNAN YANG BERMANFAAT NYATA UNTUK RAKYAT BERBASIS PEDESAAN

MISI 2.

MEMPERLUAS INOVASI DAN REFORMASI BIROKRASI DEMI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

PERANGKAT DAERAH

TUJUAN

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN

SASARAN STRATEGIS 1

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN PENYELESAIAN TLHP

SASARAN STRATEGIS 3

PENINGKATAN PENANGANAN KASUS

SASARAN STRATEGIS 4

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

KEGIATAN

PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

- PEMERIKSAAN REGULER (PKPT)
- PEMERIKSAAN KASUS
- REVIU LKj PEMKAB
- REVIU LKPD
- REVIU RPJMD PEMKAB
- REVIU RKPD PEMKAB
- REVIU RENJA PD
- REVIU RKAP 2018 DAN RKA 2019
- EVALUASI SAKIP SKPD
- EVALUASI ZI
- EVALUASI RB
- VERIFIKASI DANA BOS
- PENCEGAHAN PUNGLI
- PEMERIKSAAN DD/ADD
- PEMERIKSAAN FISIK DESA

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH

MISI 2.

MEMPERLUAS INOVASI DAN REFORMASI BIROKRASI DEMI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

KEPALA DAERAH (MISI 2)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

INSPEKTUR (Eselon 2)

SASARAN 1: Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Sasaran:
% PD yang tidak mempunyai temuan terkait KerugianDaerah dari hasil rik Inspektorat

SASARAN 2: Peningkatan Penyelesaian TLHP

Indikator Sasaran:
- % Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
- % Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal

SASARAN 3: Peningkatan Penanganan Kasus

Indikator Sasaran:
% Pemeriksaan Kasus yang Diselesaikan

SASARAN 4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran:
% PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH (Eselon 3)

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

PELAKSANA/ JABATAN FUNGSIONAL

KEGIATAN: Pengawasan Internal Secara Berkala - Pemeriksaan Reguler (PKPT)

Indikator Kegiatan: Jumlah LHP yang Diselesaikan

KEGIATAN: Pemantauan TLHP APIP

Indikator Kegiatan: Jumlah Kegiatan Pemantauan TLHP APIP yang Dilaksanakan

KEGIATAN: Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal

Indikator Kegiatan: Jumlah Kegiatan Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal yang Dilaksanakan

KEGIATAN: Penanganan Kasus

Indikator Kegiatan: Jumlah Kasus yang Diselesaikan

KEGIATAN: Evaluasi Implementasi SAKIP

Indikator Kegiatan: Jumlah LHE yang Diselesaikan

CROSS CUTTING

MISI 2.

MEMPERLUAS INOVASI DAN REFORMASI BIROKRASI DEMI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

STRATEGI UMUM

Menurunkan angka kemiskinan; Mengoptimalkan potensi sektor Pariwisata; Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Peningkatan Penyelesaian TLHP

Peningkatan Penanganan Kasus

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

KEGIATAN:
Pengawasan Internal Secara Berkala

Pemeriksaan Reguler (PKPT)	Pemeriksaan Kasus

KEGIATAN:
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Pemutakhiran Data Rekomendasi APIP
- Koordinasi pemantauan TLHP BPKRI

KEGIATAN:
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Reviu Dokumen Pemerintah Daerah
- Evaluasi Implementasi SAKIP

PROSES BISNIS

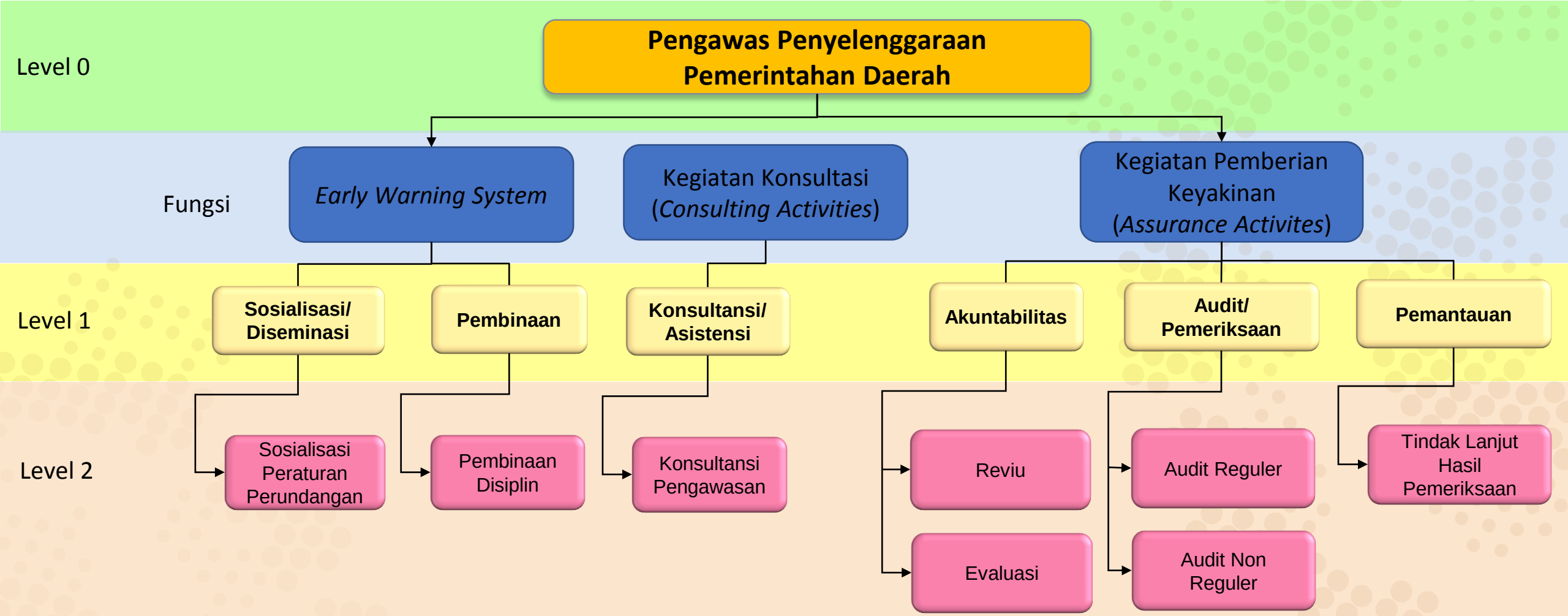
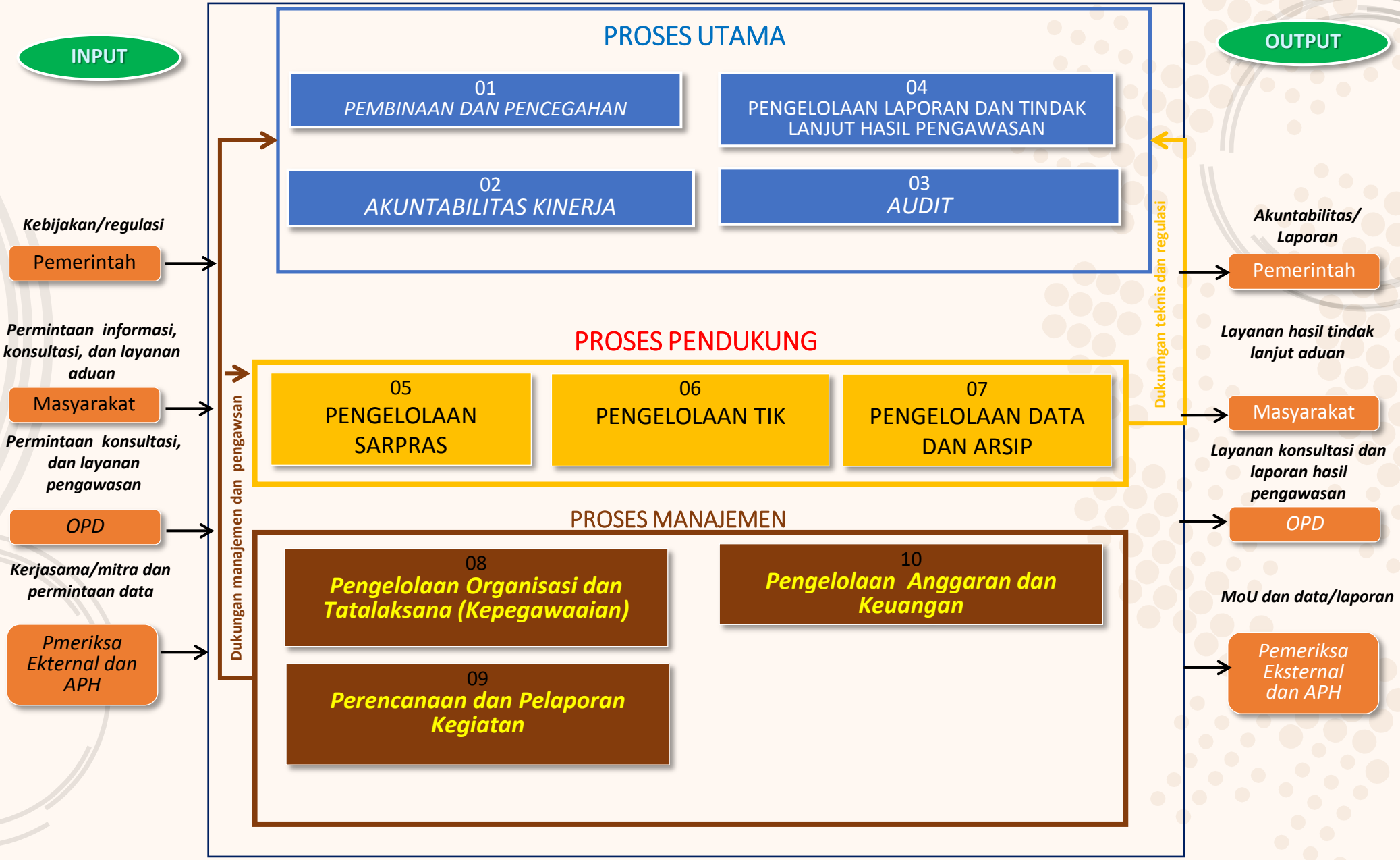
PROSES BISNIS